

# Inovasi Pemerintah dalam mengatasi pemukiman kumuh di Jeneponto melalui E-Sure

Vol 6 Issue 1  
(April, 2022)

Eka Purwanti<sup>1</sup>, Fatmawati Andi Mappasere<sup>2</sup>,  
Handam<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Makassar

Email: epurwanti231@gmail.com<sup>1</sup>, fatmamappasere@gmail.com<sup>2</sup>,  
handam@unismuh.ac.id<sup>3\*</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Innovation; Slum Areas; Local  
Government;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of innovation in handling slum areas in Jeneponto Regency through an innovation by utilizing technology as the main media in obtaining reports related to the number of slum areas in Jeneponto Regency. This type of research uses qualitative research with phenomenological research type. The informants in this study were eight people consisting of staff from the public works and spatial planning office of Jeneponto Regency, the housing and residential area office in Jeneponto Regency and the community. The results of this study indicate four (4) indicators in Government Innovation in Handling e-Sure-Based Slum Settlements in Jeneponto Regency, namely: Save costs, with the e-SURE application the government is easier to accommodate areas that need priority development related to slum management. in accordance with public complaints that will be followed up by the government so that it can formulate costs and development that are right on target. It saves time, with the data that is already available in the application according to community reports, making the policy makers only need to compile a program without the need to carry out in-depth studies which will take a long time. Reducing limitations, with the existence of an e-Sure-based application, it makes it easier for the community to participate in reporting slum areas in their area anywhere and anytime, so that people no longer go directly to the relevant agencies. Decision making, with the e-Sure application, it facilitates decision-making by the government with priority slum management targets.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2022 by IJGCS



## 1. Pembahasan

Permukiman adalah salah satu kebutuhan manusia yang termasuk dalam kebutuhan primer dimana hal itu harus terpenuhi supaya manusia bisa hidup layak dan sejahtera Permukiman merupakan kebutuhan individu, tapi berubah ketika individu tersebut telah berkeluarga maka menjadi kebutuhan bersama. Selain menjadi makhluk individu manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Arviansyah 2017).

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman itu terdiri dari beberapa hunian dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum. Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Akibatnya mempengaruhi jumlah hunian untuk masyarakat. Hal ini memunculkan

masalah baru pada kawasan permukiman, yaitu makin bertambahnya kawasan permukiman yang kumuh, tidak tertata dan semraut.

Inovasi adalah suatu pembaharuan atau ide yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan dan memecahkan suatu masalah. Inovasi juga sebaiknya selalu dilakukan untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam pemerintahan agar bisa mengembangkan kinerja baru didalamnya. Maka dari itu pemerintahan juga selalu dituntut agar selalu mempunyai inovasi tinggi (Fontana 2009).

Masyarakat memiliki peran utama dalam hal pembangunan, bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah penunjang dan memiliki tugas membantu pemerintah dalam menjalankan program yang dibuat, termasuk dalam hal pembangunan. Sedangkan pemerintahan memiliki peran sebagai pengarah, pembimbing bagi masyarakat, dan harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tercapainya tujuan pembangunan.

Masalah permukiman kumuh juga menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Jeneponto, dimana ada beberapa wilayah yang masuk kategori kumuh dengan ditandai masih adanya sarana dan prasarana yang tidak layak dalam menjamin standar kehidupan masyarakat, seperti drainase yang buruk, ketersediaan air, masalah sampah dan bangunan yang berhimpitan sehingga terkesan kumuh.

Tahun 2016 sehubungan dengan SK Bupati No 299 A, mengenai penetapan kawasan permukiman kumuh di kabupaten Jeneponto, maka hasilnya adalah kawasan kumuh bisa dikatakan hampir tersebar di seluruh kecamatan yang dimasukkan dalam golongan tingkatan ringan sampai dengan tingkat berat (BPS 2016).

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto adalah belum tersedianya sarana informasi terkait lokasi-lokasi permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Jeneponto. Sehingga menyulitkan pemerintah melakukan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto. Atas dasar tersebut pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan teobosan baru melalui program inovasi ini yang dinamakan e-Sure (Slim Upgrading reports). Program ini merupakan rujukan dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdapat pada no 299 A tersebut tentang tetapan lokasi perumahan serta permukiman kumuh di kabupaten Jeneponto untuk menjadikan inovasi yang dilakukan untuk terciptanya informasi penanganan permukiman kumuh sebagai inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sumber informasi penanganan permukiman kumuh yang diharapkan mampu diakses serta mudah diupdate oleh individu yang peduli terhadap kawasan sekitar (JenepontoKab.go.id).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat suatu judul penelitian terkait Inovasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Berbasis e-SURE di Kabupaten Jeneponto, dengan melihat sejauh mana program ini mampu untuk meminimalisir permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto.

## 2. Metode

Waktu serta lokasi penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya seminar proposal dan bertempat di Kabupaten Jeneponto. Adapun penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena ini bertepatan dengan dimana program e-Sure itu dijalankan. Dan tepatnya memilih kecamatan Bangkala sebagai tujuan utama untuk melakukan penelitian karena didasarkan pada jumlah data BPS yang menempatkan kecamatan Bangkala menjadi kawasan paling kumuh yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi dengan melakukan pengamatan, wawancara serta dokumentasi.

Pengabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi adalah metode untuk mengecek kembali data yang diperoleh dari beberapa sumber dari hasil pengamatan, wawancara serta dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara serta dokumen yang ada. Dan metode pengamatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data secara berulang

dengan cara yang berbeda namun dalam konteks yang sama untuk memastikan data yang diperoleh sesuai tidak dengan hanya satu sumber.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini adalah dengan menjawab sebuah permasalahan namun berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan serta lebih mendalam. Tipe penelitian yang dipergunakan yaitu adalah studi kasus, dimana tipe penelitian ini adalah mendalami sebuah kasus dan gejala yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Yang dimana diharapkan mampu memahami situasi tertentu serta mendukung teori fakta yang didapatkan dan tentu juga menemukan penyebabnya.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dilapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Salah satunya adalah staf instansi yang berbeda terkait program pelaksanaan permukiman kumuh berbasis e-Sure di kabupaten Jenepono. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka, buku, serta bacaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data yang telah diperoleh maka penulis akan mengambil sebagian data untuk kemudian dimasukkan dalam laporan penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Inovasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam berkembangnya suatu organisasi atau lembaga. Baik dari sektor wisata maupun sektor publik seperti pemerintahan yang berupaya menemukan inovasi terbaru. Inovasi biasa dipahami juga sebagai proses dan praktik yang lama untuk mencapai hasil yang baru sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berintegrasi terhadap lingkungan, pemerintah Kabupaten Jenepono membuat sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan kepada pemerintah terkait wilayah kumuh di suatu wilayah.

Melalui program *e-SURE (Slum upgrading reports)* di harapkan seluruh masyarakat akan menyampaikan data terbaru mengenai perkembangan yang terjadi terkait penanganan permukiman kumuh secara lengkap dan jelas.

Program *e-SURE* merupakan salah satu hasil dari peraturan pemerintah No. 2 tahun 2016 mengenai peningkatan kualitas perumahan kumuh penanganan kawasan permukiman kumuh di suatu daerah. Banyaknya kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jenepono yang tidak tepat sasaran berpengaruh terhadap anggaran.

Intinya sebuah ide inovasi tersebut biasanya dilengkapi atribut tersendiri, yaitu:

- 1) Memiliki keuntungan yang relatif yaitu dalam sebuah inovasi dituntut untuk selalu mempunyai nilai lebih atau lebih unggul jika dibandingkan dengan sebelumnya. Melekatnya nilai lebih serta pembaharuan tinggi maka itulah yang menjadikannya khas tersendiri dibanding lainnya.
- 2) Memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi yang membuat adanya sebuah inovasi terbaru harus juga menyiapkan cara yang baru atau dalam arti yang lain, mempunyai jalan cadangan untuk mempermudah tingkatan yang dianggap rumit tersebut.
- 3) Menyesuaikan inovasi sesuai dengan inovasi yang telah diperbaharui sebelumnya. Supaya masa peralihan dan juga adaptasi antara inovasi lama menuju yang baru tidak terlalu berbeda jauh. Dengan seperti ini maka diharapkan memudahkan lagi prosesnya.

Salah satu cara dianggap yang memudahkan agar mengetahui berhasilnya sebuah ide yang baru dengan mengecek dan dilihat dari seberapa besar tingkat keuntungan (Wibisono 2006: 113). Inovasi juga dinilai memiliki kaitan dengan teknologi komunikasi informasi, terutama dengan internet yang memiliki peran didalam kepercayaan transparansi.

Hal tersebut memiliki manfaat pada dua tingkatan yang di kelompokkan menjadi dua :

#### a. Manfaat di Tingkat Proses

Hematnya biaya yakni berkurangnya biaya didalam transaksi untuk individu dalam mengakses info pada pemerintahan serta mengirimkan info terbaru ke pemerintahan. Yang biasanya masyarakat berfikir untuk sampai ke kantor sedangkan tempat tinggal yang jauh dan belum lagi biaya administrasi didalamnya. Menghemat waktu atau mengefesienkan waktu

yaitu mempercepat proses pertukaran data baik dari pemerintah ke instansi lain, dari masyarakat ke pemerintah, serta pemerintah ke masyarakat. Dan dengan adanya inovasi seperti ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang lebih nyata dilapangan disertai dokumentasi dan jelas titik daerah permasalahannya. Mengurangi adanya keterbatasan bahwa formasi serta pelayanan lainnya, individu bisa mengakses tanpa adanya batasan di jam kerja tidak juga terbatas di mana dan kapan waktunya. Seorang pemimpin atau pimpinan dapat menentukan pilihan serta keputusan yang lebih baik lagi, pimpinan bisa mengetahui apa dan seperti apa aktivitas yang dijalankan. Dan dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan jelas karena dapat melihat secara virtual apa saja yang harus dibenahi terlebih dahulu.

b. Manfaat pada Tingkat Pengelolaan

Mengubah perilaku masyarakat dengan mendorong partisipasi yang lebih besar lagi terhadap proses perencanaan program pemerintahan. Mengubah perilaku aparatur seperti misalnya dalam mengurangi tindakan pemalsuan data sehingga korupsi berkurang, dapat bekerja lebih efektif sehingga dapat bekerja secara efektif meskipun tidak hadir di instansi dan dapat memenuhi secara teratur pelayanan untuk masyarakat. Inovasi e-Sure (slum upgrading reports) adalah sebuah inovasi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem informasi penanganan suatu permukiman kumuh yang mudah diupdate dan diakses oleh masyarakat yang peduli terhadap permasalahan tersebut (Rindarjono 2012).

Diterimanya sebuah ide atau cara terbaru didalam lingkungan masyarakat apabila dinilai memiliki tingkatan unggul dari lainnya. Inovasi akan memikat masyarakat untuk berpartisipasi apabila tentunya memiliki nilai unggul yang lebih yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan ide atau program yang sebelumnya.

Sebuah inovasi dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto memerlukan waktu yang cukup panjang dalam rangka menangani kawasan kumuh di wilayah tersebut. Namun sesuai amanat kementerian PUPR terkait kawasan kumuh maka pemerintah mendorong sebuah terobosan untuk meminimalisir waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program. Mengurangi keterbatasann ditujukan untuk dijadikan prinsip yang penting yang harus dimiliki oleh pemerintahan. Pertanggung jawaban terkait laporan yang diberikan juga adalah hasil dari kinerja yang diberikan selama masa periode yang ditentukan. Dalam konsep *good governance* pemerintah dituntut lebih transparan kepada masyarakat tanpa membatasi segala informasi. Selama ini dalam mengatasi pemukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto pemerintah daerah bekerja sendiri dalam melakukan observasi sampai kepada tahap penyusunan agenda dalam pengelolaan kawasan kumuh yang ada tanpa keterlibatan masyarakat sedikitpun. Munculnya inovasi *e-SURE* mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemantauan kawasan kumuh sehingga pemerintah juga lebih terbuka dalam kegiatan pengelolaannya.

Keputusan yang Lebih Baik Bagi pemerintah daerah kehadiran inovasi dapat mempengaruhi sebuah keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan daerah saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, termasuk penanganan kawasan kumuh karena apabila ditangani dengan tidak optimal dan cepat pasti akan memunculkan persoalan yang lain. Salah satu bentuk masalah yang mempengaruhi keputusan pemerintah karena tidak adanya ketersediaan data terkait kawasan kumuh sehingga dengan hadirnya aplikasi pelaporan kawasan kumuh dapat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan. Dalam penanganan permukiman kumuh terlebih dahulu perlu diketahui kebutuhan kawasan dan akar masalahnya, agar dapat dirumuskan arahan yang tepat. Untuk dapat mengetahui pola penanganan yang tepat, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana tingkat kumuh berdasarkan beberapa kriteria peniaian, sehingga dapat diketahui kelas kawasan kumuh permukimannya. Penggunaan aplikasi dalam rangka membantu pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto akan memberikan masukan dalam membuat program sehingga instansi pemerintah terkait dapat merencanakan anggaran yang akan digunakan.

Berpartisipasinya masyarakat dalam kegiatan program pembangunan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai sasaran dari sebuah program, namun masyarakat juga dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program. Di era digitalisasi seperti sekarang ini memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi langsung dengan pemerintah dalam rangka proses percepatan pembangunan. Aplikasi berbasis teknologi dalam rangka memuat laporan terkait kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto melibatkan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membentuk kelompok-kelompok dalam melakukan mapping kawasan kumuh di suatu wilayah. Waktu (*timeliness*) yang tepat adalah salah satu faktor yang dalam penyajian informasi yang sesuai dengan fakta sangat memiliki peran penting didalamnya. Informasi yang didapatkan juga akan memiliki manfaat jika tersampaikan dengan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Dan ketepatan waktu dianggap penting dalam tingkat manfaat pembangunan karena dapat terealisasi dengan tepat sesuai target. Ketersediaan informasi dari program *e-SURE* terkait pelaporan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto memberikan kemudahan bagi dinas pekerjaan umum dalam membuat program yang bisa direalisasikan sesuai dengan ketetapan waktu yang sudah ditentukan.

Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat sangat berharap agar ada perbaikan pelayanan termasuk dalam pengelolaan kawasan kumuh. Banyak masyarakat yang resah akibat keterlambatan pemerintah dalam mengelola lingkungan yang berbasis kotak tanpa kumuh sehingga lambatnya pelayanan tersebut menjadikan Kabupaten Jeneponto menjadi rawan banjir di setiap musim penghujan tiba. Alasan dibentuknya sebuah inovasi karena keinginan aparaturnya pelayanan publik memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pengintegrasian data kedalam sebuah bentuk aplikasi pelaporan kawasan kumuh aksi nyata pemerintah dalam membuka informasi dan mengurangi keterbatasan dalam proses pelayanan. Aplikasi *e-SURE* dalam menyediakan pelaporan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto tentu memberikan pengaruh kepada program yang akan dijalankan oleh pemerintahan. Perbedaan masalah serta sasaran pembangunan yang tersedia menjadi penting dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Tuntutan inovasi menjadikan pemerintahan daerah adalah sebagai ujung tombak didalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selalu diharuskan memiliki ide baru yang bisa digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. Pemerintahan adalah pihak yang berpengaruh didalam proses pembangunan. Keahlian serta tugas pemerintahan adalah faktor yang menentukan pengambilan keputusan kearah yang lebih baik dan jelas. Dalam mengambil keputusan terkait penanganan kawasan pemukiman kumuh pemerintah Kabupaten Jeneponto memerlukan standarisasi agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan hasil terbaik. Sehingga kehadiran aplikasi *e-SURE* lebih mempermudah pemerintah dalam bekerja secara terstruktur.

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jeneponto kearah yang lebih baik di butuhkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan tidak boleh berdasarkan pedoman umum dan beberapa informasi saja karena cenderung akan menghasilkan kebijakan yang tidak optimal. Masyarakat sebagai target dan sasaran dari program penanganan pemukiman kumuh menjadi aspek yang terpenting dalam mengevaluasi keputusan yang diambil pemerintah berkaitan dengan itu tentu pemerintah lebih berhati-hati dari program pembangunan. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait upaya mengurangi keterbatasan informasi melalui kehadiran aplikasi *e-SURE* merupakan sebuah target pemerintah Kabupaten Jeneponto agar masyarakat memperoleh informasi terkait penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jeneponto. Selain itu masyarakat dapat bertukar informasi kepada pemerintah terkait kondisi wilayah mereka, agar pemerintah dapat membentuk regulasi dalam penanganan masalah yang ada di masyarakat. Inovasi *e-SURE* (*Slum Upgrading Reports*) yang merupakan sistem penanganan kumuh yang ada di Kabupaten Jeneponto, inovasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem informasi penanganan pemukiman kumuh yang diharapkan mudah diupdate dan diakses oleh masyarakat yang peduli terhadap penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Jeneponto.

Melalui program tersebut di harapkan pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat merumuskan sebuah kebijakan terkait penanganan pemukiman kumuh. Tapi dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala seperti sulitnya di akses karena tidak terhubung dengan website pemerintah yang telah tersedia. Masyarakat dari kalangan lebih modern cenderung dapat lebih mudah menerima adanya inovasi terbaru yang berkaitan dengan lingkungannya, daripada dibandingkan dengan kalangan yang dalam artian sangat menerapkan atau menjunjung nilai kehidupan tradisional. Masuknya budaya modern didalam lingkaran kalangan masyarakat membuat sebuah ide baru lebih mendapatkan aura positif serta lebih dihargainya sebuah ilmu pengetahuan dan lebih banyak berinteraksi dengan orang diluar kelompoknya.

Didalam melakukan penyebaran inovasi juga bisa digunakannya cara yang pertama secara difusi yang dimana ini memiliki arti sebagai suatu proses pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan untuk kemudian mengkomunikasikan inovasi lewat jaringan sarana komunikasi yang tersedia. Kemudian digunakannya cara kedua yaitu diseminasi merupakan suatu proses disebarluaskannya sebuah ide yang sudah terencana dan terarah serta terkelola. (Suwarno 2008).

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Inovasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Berbasis e-SURE di Kabupaten Jeneponto maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Menghemat biaya, dengan adanya aplikasi *e-SURE* pemerintah lebih mudah mengakomodir daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan prioritas terkait penanganan kawasan kumuh sesuai dengan aduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga dapat merumuskan biaya dan pembangunan yang tepat sasaran. Menghemat waktu, dengan adanya data yang telah tersedia pada aplikasi sesuai laporan masyarakat membuat para pemangku kebijakan tinggal menyusun program tanpa perlu melakukan pengkajian mendalam yang akan memakan waktu yang lama. Mengurangi keterbatasan, dengan adanya aplikasi berbasis *e-Sure* memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaporkan kawasan kumuh di wilayah mereka dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat tidak lagi mendatangi langsung dinas terkait. Pengambilan keputusan, dengan adanya aplikasi *e-Sure* memudahkan pembuatan keputusan oleh pemerintah dengan target prioritas penanganan kawasan kumuh.

#### **Acknowledgment**

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

#### **References**

- Adisasmita, Rahardjo.(2010). *Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arviansyah, L. (2017). *Penilaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari*. Skripsi.
- Dede Mariana.(2010). "Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan". *Governance Jurnal*.Volume 1, Nomor 1.
- Fontana, Avanti. (2009). *Innovate We Can!*. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

- Hanif Nurcholis, (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Haryanto, Asep, (2013), *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang sehat*, Jurnal PWK Unisba
- Hermanto, Edy. (2011). *Permasalahan Lingkungan Di Permukiman Kumuh Kota (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)*. Jurnal Semai Teknologi Volume 5, Nomor 1,
- H.M. Busrizalti, (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Kalo, J, .(2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global Asdi Mahasatya*, jakarta.
- Kurniasih S. (2007). *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di Pertukangan Utara Jakarta Selatan*. Jurnal. Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
- Lestari, Forina, (2006), *Identifikasi Tingkat Kerentanan Masyarakat Permukiman Kumuh Perkotaan melalui Pendekatan Sustainable Urban Livelihood (SUL) (Studi Kasus :Kelurahan Taman Sari, Bandung )*.
- Marlina, E. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Mazria.(2012). *Pengaruh Bangunan terhadap Kerusakan Lingkungan Perkotaan*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rindarjono, Mohammad Gamal. (2012). *Slum: Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta : Media Perkasa.
- Sinulingga, B.D. 2005. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Wendi Melfa, (2013). *Pemilukada Demokrasi dan Otonomi daerah*, penerbit Beprees Bandar Lampung.